

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang tinggi dan sumber daya alam yang melimpah, sebagai negara berkembang masalah-masalah seperti sosial, politik dan ekonomi masih menjadi hal yang harus diselesaikan, untuk itu perekonomian menjadi salah satu fokus utama dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Secara umum, sebelum tahun 1970-an, pembangunan dipandang sebagai fenomena ekonomi yang hanya berpatok pada tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita atau GNI (*Gross National Income*) yang diharapkan dengan sendirinya akan menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi dan juga menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi terciptanya pertumbuhan ekonomi secara merata. Dengan demikian tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang utama sedangkan masalah pembangunan lain seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan dikesampingkan. Untuk itu banyak negara - negara dunia ketiga yang berhasil meningkatkan pertumbuhannya akan tetapi tidak sedikit diantara mereka yang gagal dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, dari pengalaman ini banyak ekonom dan para peneliti yang mengevaluasi strategi dalam peningkatan pembangunan tersebut, sehingga dari evaluasi tersebut didapatkan paradigma baru terkait pembangunan ekonomi dimana konsep pembangunan ekonomi bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi akan tetapi juga bagaimana

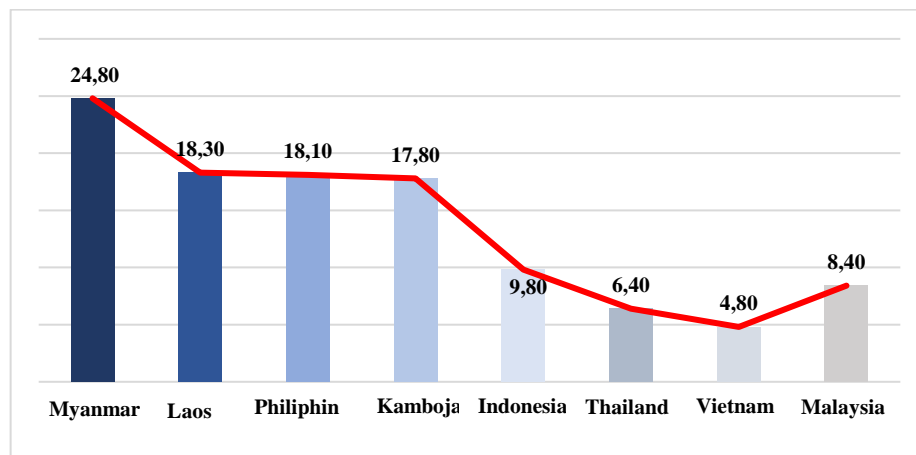
perbaikan mendasar struktur sosial masyarakat, penanganan ketimpangan pendapatan, dan juga pengentasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2006)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1995 menjelaskan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik secara material dan spiritual yang tentunya berdasarkan Pancasila dan undang-undang dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan ber kedaulatan rakyat dalam suasana per kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis. Namun, maraknya kegiatan dan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya mampu menyejahterakan bangsa dan negara. Pembangunan di berbagai sektor juga belum dapat menampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat (Solikatun et al., 2018). Hingga saat ini masalah kemiskinan merupakan masalah yang belum terselesaikan, padahal pengentasan kemiskinan merupakan salah satu dari program pembangunan nasional.

Kemiskinan merupakan kondisi absolut ataupun relatif di dalam lingkungan tertentu, yang dimana dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seseorang atau bahkan kelompok tidak mampu mencukupinya sesuai tata nilai dan norma yang berlaku (Dahuri & Nugroho, 2012). Dalam aspek ekonomi, kemiskinan menunjukkan rentang *gap* antara *purchasing power* dan keinginan seseorang dalam mencukupi kebutuhan pokok hidupnya. Banyak pendapat tentang bagaimana kemiskinan terjadi, menurut Arsyad dalam (Rini & Sugiarti, 2017) terjadinya kemiskinan dikarenakan pasifnya masyarakat dalam keikutsertaan dalam proses perubahan, hal ini disebabkan karena masyarakat

tidak memiliki kemampuan dalam faktor produksi yang mumpuni. Sedangkan bertolak belakang dengan pendapat tersebut, Sen dalam Todaro dan Smith (2006;3) berpendapat bahwa kemiskinan bukan tentang bagaimana individu atau kelompok mengalami kekurangan terhadap suatu komoditi atau tidak puas dengan komoditi tersebut namun lebih kepada kondisi seseorang atau kelompok tidak atau kurang dapat memaksimalkan fungsi dan mengambil manfaat dari komoditi tersebut.

Kemiskinan sebagai problematika pembangunan yang tidak berujung khususnya bagi negara-negara berkembang seperti di sebagian negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, Philipines, dan Indonesia. Kawasan Asean menyajikan perspektif perekonomian yang cukup stabil dari tahun ke tahun (Azzahro & Prakoso, 2022). Berikut data tingkat kemiskinan di negara-negara di asia Tenggara tahun 2020:



Sumber : *Asean Statistic Yearbook* (2020)

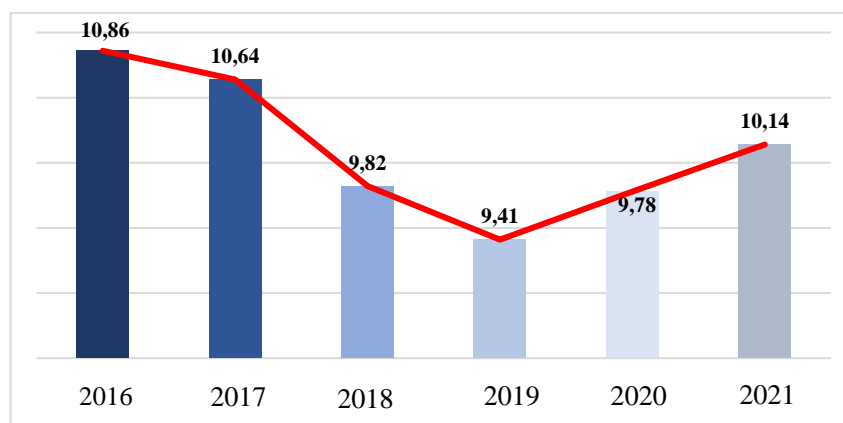
- Data terbaru Laos hanya tersedia sampai tahun 2018
- Data terbaru Vietnam hanya tersedia sampai 2019

GAMBAR 1.1

Grafik tingkat kemiskinan di 8 negara ASEAN tahun 2020 (%)

Berdasarkan grafik 1.1 di atas menjelaskan bahwa posisi Indonesia berada pada urutan kelima dengan tingkat kemiskinan tertinggi di antara negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) lainnya. Thailand, Malaysia, dan Vietnam masih berada diatas Indonesia dengan tingkat kemiskinan terendah, sedangkan Philippines, Kamboja, Laos, dan Myanmar berada di atas Indonesia dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Persentase tingkat kemiskinan Indonesia yaitu 9.8%, berjarak 1,4% dari Malaysia.

Indonesia sebagai negara dengan tingkat penduduk tertinggi di antara negara ASEAN lainnya, dimana proyeksi jumlah penduduk di tahun 2020 Indonesia mencapai sekitar 269.603,4 juta jiwa (BPS 2020). Kemiskinan di Indonesia dari tahun ke tahun terjadi perubahan, perubahan yang paling terlihat terjadi pada situasi-situasi tidak terprediksi seperti di tahun 2019-2021 Indonesia dilanda pandemi Covid-19, akan tetapi jika dilihat secara global negara-negara maju seperti Amerika, China juga mengalami fluktuasi yang tajam. Berikut data tingkat kemiskinan di Indonesia 6 tahun terakhir:



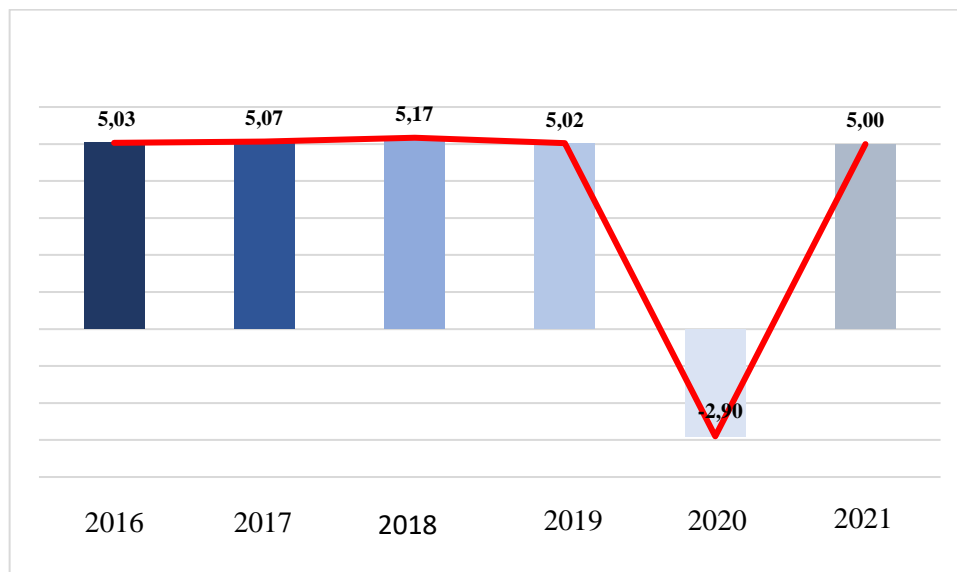
Sumber : BPS (2022)

GAMBAR 1.2.
Grafik tingkat kemiskinan di Indonesia 2015-2021 (%)

Berdasarkan grafik 1.2 di atas menjelaskan bagaimana tingkat kemiskinan berfluktuasi di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2021, akan tetapi fluktuasi yang digambarkan pada grafik tersebut tidak berubah secara signifikan, dari tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi penurunan sebesar -2.02%, dari tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi penurunan sebesar -7.7%, dari tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi penurunan sebesar -4.1%, akan tetapi di tahun 2019 hingga tahun 2021 terjadi kenaikan tingkat kemiskinan, di tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 3.9%, dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 3.6%.

Keberhasilan pembangunan dalam suatu negara salah satunya diindikasikan dari naiknya atau stabilisasi pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mengatasi salah satu tujuan pembangunan yakni pengentasan kemiskinan seperti pada teori *trickle down effect* yang menjadi landasannya. Dalam teori *trickle down effect* dijelaskan ketika sekelompok masyarakat mendapatkan peningkatan taraf hidup khususnya secara material, kondisi ini akan otomatis menyebar dan memberikan peluang pada kelompok-kelompok lain (Soleh, 2015). Terciptanya berbagai peluang ekonomi seperti terbukanya lapangan pekerjaan menumbuhkan kondisi perbaikan perekonomian yang diharapkan adanya pemerataan terhadap distribusi hasil pertumbuhan ekonomi tersebut. Keberhasilan dalam pertumbuhan tersebut akan dirasakan manfaatnya oleh si kaya, diikuti bertambah tingginya penduduk miskin memiliki peluang mendapatkannya ketika si kaya membelanjakan hasil dari pertumbuhan

tersebut. Aliran manfaat secara vertikal ini secara tidak langsung menunjukkan bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Di Indonesia sendiri tingkat pertumbuhan ekonomi selalu mengalami perubahan setiap tahunnya, berikut grafik tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia 6 tahun terakhir.



Sumber : BPS (2022)

GAMBAR 1.3

Grafik pertumbuhan ekonomi nasional dari tahun 2015-2021 (%)

Grafik diatas menunjukkan bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dari tahun 2019 hingga 2018 kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan, dari tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 0,15 dan dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi secara tajam yaitu penurunan tajam mencapai -7,2, akan tetapi di tahun 2020 terjadi kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai nilai 5%.

Masih mengacu pada teori *trickle down effect* dimana disebutkan pertumbuhan berpengaruh terhadap kemiskinan, namun jika pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh pemerataan distribusi hasil pertumbuhan ekonomi maka akan menyebabkan ketimpangan, dimana seperti kata pepatah “yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin”. Adanya ketimpangan dalam hasil-hasil distribusi pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya ketidakadilan dalam pengelolaan perekonomian tersebut. Seperti dalam al-quran surat An-nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi dapat berdampak positif bagi pengentasan kemiskinan jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi berada pada pihak penduduk miskin (Soleh, 2015). Selain pertumbuhan ekonomi ketimpangan juga termasuk ke dalam hal-hal yang mempengaruhi perubahan kemiskinan seperti yang dipaparkan sugiyarto dalam Putra et al., (2021) dimana kesenjangan penyebaran pendapatan dapat berdampak pada perubahan kemiskinan yang kian parah atau dapat dikatakan kesenjangan dalam bentuk kemiskinan. Dalam pengukuran ketimpangan salah satu indikator yang dapat digunakan adalah gini ratio.

Masalah kemiskinan tidak lepas dari kebijakan pengurangan tingkat pengangguran, baik dinegara berkembang maupun negara maju. Terdapat

hubungan positif antara pengangguran yang terus meningkat dengan kemiskinan yang terus meluas (Quy, 2016), artinya pengangguran berbanding lurus dengan kemiskinan, ketika pengangguran meningkat maka angka kemiskinan juga semakin tinggi. Sedangkan disisi lain terdapat hubungan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana hubungan tersebut memiliki pengaruh negatif (Purwanti & Rahmawati, 2021), artinya ketika tingkat pengangguran naik maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi jangka panjang salah satunya ditopang oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan kemajuan teknologi. Aspek-aspek fisik dan non-fisik penting dalam mendorong pengembangan kualitas manusia seperti angka harapan hidup, kualitas pendidikan, dan kemampuan ekonomi masyarakat. Tolak ukur yang digunakan dalam menghitung nilai dari tingkat kualitas manusia ialah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), lingkaran setan kemiskinan menjadikan IPM memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Pertanyaan mengapa seseorang miskin? karena mereka berpenghasilan rendah, lalu mengapa berpenghasilan rendah? karena mereka tidak memiliki pekerjaan berkualitas, kenapa tidak memiliki pekerjaan berkualitas? Karena rendahnya pendidikan dan akhirnya tidak memiliki keterampilan, kenapa pendidikan rendah? Karena miskin. Untuk itu indikasi dari perbaikan kualitas dari sumber daya manusia berakibat pada meningkatnya produktivitas dari masyarakat dan juga peningkatan pendapatan masyarakat.

Investasi berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal atau investasi berperan dalam mendukung peningkatan produksi *output* barang dan jasa dalam perekonomian. Terjadinya peningkatan *output* produksi menjadikan permintaan tenaga kerja juga meningkat, hal ini menjadikan tingkat pengangguran yang menurun.

Pendapatan masyarakat dapat di standarisasi salah satunya dengan upah minimum. Pekerja atau buruh, pengusaha, pemerintah dan masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda terhadap penetapan upah minimum. Pekerja sangat bergantung terhadap penetapan upah minimum dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar. Disisi lain bagi perusahaan penetapan upah termasuk ke dalam biaya produksi, penetapan terhadap upah minimum diharapkan dapat menekan biaya produksi.

Salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang menyerap pengangguran dalam rangka mengurangi kemiskinan, disisi lain investasi berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi. Indonesia sendiri gencar dalam upaya menarik para investor untuk berinvestasi ke dalam negeri dengan memberikan kemudahan izin serta jaminan lainnya. Hal ini dilakukan agar menuai banyak manfaat dari kegiatan investasi tersebut seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan per kapita, mengurangi kemiskinan, meningkatkan standar hidup, dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) (Alice & Hulu, 2021).

Permasalahan kemiskinan yang dipengaruhi beberapa faktor seperti yang sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya yaitu investasi, pengangguran,

rasio gini, upah minimum dan IPM menjadikan peneliti tertarik untuk membahas permasalahan ini, di samping itu untuk melihat hubungan investasi, pengangguran, upah minimum, rasio gini, dan IPM terhadap kemiskinan, peneliti menambahkan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel penghubung, yang dimana nantinya terlihat pengaruh dari Investasi , UMP, TPT, IPM dan Rasio gini terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, didapatkan ruang lingkup dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Variabel *dependent* yang digunakan pada penelitian ini ialah pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.
2. Variabel *independent* yang digunakan pada penelitian ini ialah variabel Investasi , Upah Minimum Provinsi (UMP), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Rasio Gini.
3. Variabel *intervening* pada penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi.
4. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data dari 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2016 sampai 2021.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang dan Batasan masalah didapatkan bahwa Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh variabel Upah Minimum Provinsi (UMP), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Investasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Rasio Gini terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

2. Bagaimana pengaruh variabel Upah Minimum Provinsi (UMP), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh variabel Upah Minimum Provinsi (UMP), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Investasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Rasio Gini terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan didapatkan bahwa tujuan penelitian dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh variabel Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi (UMP), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Rasio Gini terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Provinsi (UMP), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh variabel Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi (UMP), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Rasio Gini terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat praktis

Bagi pihak pemerintah atau institusi pemerintahan, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan serta pertimbangan dalam mengentaskan kemiskinan secara nasional.

2. Manfaat teoritis

Bagi pihak institusi pendidikan serta para peneliti selanjutnya, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi tambahan untuk kajian peneliti lain yang mungkin akan mengembangkan pada ruang lingkup yang sama. Selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan memperluas wawasan mengenai pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia, Investasi, Tingkat pengangguran terbuka, Upah minimum dan Gini rasio terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia